

PERAN KUALITAS AUDIT DALAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN KELUARGA DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DENGAN PENGHINDARAN PAJAK

Salma Afrilia¹⁾
Masripah²⁾
Ermawati³⁾

^{1, 2, 3)} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, email: salmaafriia03@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of audit quality in the relationship between family ownership and institutional ownership with tax avoidance in listed manufacturing companies in the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. This study is a quantitative research using random effect model. This study uses secondary data in the form of company annual reports. Sample of this study is 71 manufacturing companies. The data analysis technique used are the regression model selection test, classic assumption test, multiple regression analysis test, and hypothesis testing. The results of data analysis indicate that (1) family ownership has a significant positive effect on tax avoidance, (2) institutional ownership has a significant negative effect on tax avoidance, (3) audit quality has no role in weakening the relationship between family ownership and tax avoidance, and (4) audit quality has no role in strengthening the relationship between institutional ownership and tax avoidance.

Keywords: Family Ownership; Institutional Ownership; Audit Quality; Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan negara berupa pungutan wajib masyarakat, baik orang pribadi maupun badan, yang diatur oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam merefleksikan implikasi kebijakan pemerintah pada perpajakan, rasio pajak digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran penerimaan pajak dengan cara membandingkan persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut hasil pengamatan yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), mengatakan rasio pajak Indonesia yang diukur terhadap PDB pada tahun 2019 hanya 10,7 persen sedangkan rata-rata OECD sebesar 34,3 persen. Angka tersebut dapat dikatakan tertinggal apabila ditimbang dengan rasio pajak Malaysia dengan rasio 13,6 persen dan Singapura dengan rasio 14,1 persen.

Dalam laporan OECD yang bertema *Revenue Statistic in Asia Pacific Economies 2019*, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rasio pajak Indonesia masih rendah, salah satunya adalah penghindaran pajak. Perusahaan selaku subjek pajak penghasilan negara memiliki perbedaan sudut pandang dengan pemerintah terkait pemaknaan pajak. Perusahaan sebagai entitas yang mementingkan keuntungan menilai pajak sebagai sebuah beban yang akan mengancam rendahnya laba perusahaan (Putri, 2015). Namun, di sisi lain pemerintah menganggap pajak sebagai iuran wajib para subjek pajak untuk mengoptimalkan penerimaan kas negara. Perbedaan tersebut memotivasi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan realisasi pajak turun (Darmawan and Sukartha, 2014).

Maraknya praktik penghindaran pajak di Indonesia tidak terlepas dari struktur kepemilikan perusahaan yang memiliki peran dalam penetapan suatu kebijakan di perusahaan. Kepemilikan keluarga merupakan salah satu bagian dari struktur kepemilikan yang terdiri dari orang pribadi dan perusahaan lokal dengan persentase di atas lima persen, yang mana bukan termasuk perusahaan publik, negara ataupun institusi keuangan (Villalonga and Amit, 2006). Keberadaan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menyebabkan konflik keagenan, bukan lagi terjadi pada agen perusahaan dengan pemegang saham, tetapi pemegang saham mayoritas dengan minoritas dalam mengambil kebijakan perusahaan (Masripah, Diyanty and Fitriasar, 2015).

Salah satu kebijakan yang dipilih adalah kebijakan perpajakan terkait tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan guna meningkatkan keuntungan yang didapat melalui pengurangan beban perusahaan. Menurut Gaaya *et al.*, (2017), perusahaan keluarga cenderung agresif terhadap pajak daripada perusahaan non-keluarga akibat peluang keuntungan yang dimilikinya. Keuntungan dari penghematan pajak di perusahaan lebih besar daripada kemungkinan terkena denda pajak dan kerugian akibat reputasi perusahaan yang rusak, sehingga menciptakan peluang bagi pemegang saham mayoritas dalam mendorong manajer untuk turut terlibat dalam pemilihan kebijakan perusahaan.

Penelitian terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016), Gaaya *et al.*, (2017), serta Wirdaningsih *et al.*, (2018) menunjukkan perusahaan dengan penghindaran pajak dipengaruhi secara signifikan oleh struktur kepemilikan keluarga. Akan tetapi,

Maharani dan Juliarto (2019) serta Wijayani (2016) menyatakan hal berbanding terbaik, dimana penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga.

Peran pemilik perusahaan yang direfleksikan melalui sebuah persentase seberapa besar porsi kepemilikan dari setiap pihak yang diyakini memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dengan mengawasi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Salah satu struktur kepemilikan tersebut dimiliki oleh pihak institusi, seperti yayasan, bank, perusahaan investasi, dana pensiun, dan institusi lain (Edison, 2017). Kepemilikan institusional mengindikasikan adanya kemampuan dalam meningkatkan pengawasan yang lebih optimal kepada kinerja manajer perusahaan guna mengurangi masalah keagenan (Winata, 2014). Kepemilikan saham institusi yang semakin tinggi akan meningkatkan pengawasan kepada manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Kepemilikan institusional diyakini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan, salah satunya di sektor manufaktur. Sektor manufaktur menjadi sektor yang esensial untuk diawasi karena perannya sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu penopang perekonomian negara. Pengawasan terhadap manajemen akan mampu mengurangi perilaku oportunistik manajer dalam memutuskan sebuah kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Krisna (2019), dikatakan adanya indikasi dorongan dari investor institusi kepada manajer perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak, sehingga tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Dilihat dari hasil tersebut, kepemilikan institusional mampu menciptakan kontrol perusahaan terutama dalam mengurangi tindakan oportunistik manajer yang lebih mementingkan keuntungan pribadi (Wijayani, 2016).

Penelitian terkait penghindaran pajak yang dipengaruhi kepemilikan institusional telah banyak dilakukan. Pada penelitian Wijayani (2016), Khan *et al.*, (2017), dan Krisna (2019) menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan dari kepemilikan institusional kepada penghindaran pajak. Berbeda pada penelitian milik Tandean dan Winnie (2016) dan Septiadi *et al.*, (2017) yang menyatakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Berbagai upaya dilakukan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, salah satunya dengan penerapan komponen tata kelola perusahaan, yaitu dengan kualitas audit yang memiliki prinsip transparansi pada laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

DeAngelo dan Masulis (1980) mengatakan bahwa kualitas audit dianggap sebagai solusi dalam yang mampu mengontrol tindak kecurangan manajer dalam laporan keuangan. Dengan adanya transparansi pada laporan keuangan menjadi salah satu wujud keterbukaan informasi kepada pengguna laporan keuangan terkait kondisi keuangan perusahaan dan prospek ke depan perusahaan.

Auditor independen merupakan salah satu pihak eksternal yang memiliki kemampuan dalam menemukan salah saji material pada laporan keuangan serta mampu melaporkan kesalahan tersebut guna menjaga informasi yang dimuat pada laporan keuangan dan mencerminkan nilai dari suatu perusahaan. Auditor pada KAP *The Big Four* diyakini lebih berpengalaman dan profesional serta mampu menjaga reputasinya dengan menyajikan kualitas audit yang tinggi (Krisna, 2019). Kemampuan auditor dalam menentukan tingkat materialitas dengan tepat serta mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang disusun pihak manajemen dapat meningkatkan kualitas audit. Laporan keuangan auditan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Sehingga, dalam pengambilan kebijakan perusahaan kepemilikan saham perusahaan atau investor juga harus memperhatikan peran auditor eksternal tersebut sebagai pemeriksa laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kualitas Audit dalam Hubungan Kepemilikan Keluarga dan Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak”. Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak?, 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?, 3) Apakah pengaruh kualitas audit memperlemah hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak?, 4) Apakah pengaruh kualitas audit memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis secara empiris pengaruh signifikan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, 2) Untuk menganalisis secara empiris pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, 3) Untuk menganalisis secara empiris pengaruh kualitas audit dalam memperlemah hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, 4) Untuk menganalisis secara

empiris pengaruh kualitas audit dalam memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dibangun menggunakan *grand theory* yaitu teori keagenan. Teori keagenan merupakan suatu kontrak yang dilakukan dengan menempatkan pemilik modal atau pemegang saham sebagai *principal* yang mempekerjakan pihak manajemen sebagai agen untuk melakukan jasa kepada perusahaan dan diberikan wewenang dalam mengelola usaha demi kepentingan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Hal tersebut berarti, agen harus mampu menetapkan kebijakan terbaik untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham (Sugiarto, 2011).

Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait kinerja perusahaan dalam satu periode. Informasi pada laporan keuangan perlu disajikan secara lengkap, akurat, dan transparan guna mengurangi asimetri informasi. Namun, akibat adanya pemisahan kepemilikan terkadang menyebabkan adanya kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara pemegang saham dengan agen (Lisa, 2012). Ketidakseimbangan informasi ini terjadi akibat pihak agen yang mendapatkan pengetahuan cukup banyak tentang kondisi dan prospek ke depan perusahaan daripada pemegang saham yang hanya menerima informasi dari hasil laporan yang diberikan oleh agen. Akibatnya, agen memiliki *self interest* untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengambil keputusan yang merugikan pemegang saham perusahaan.

Masalah keagenan yang timbul tidak lagi menjadi masalah antara pemegang saham dengan agen, melainkan antar pemegang saham, yaitu mayoritas dan minoritas. Hal tersebut karena tingginya persentase kepemilikan keluarga menempatkan anggota keluarga sebagai pemegang saham mayoritas yang memiliki hak kendali dalam proses penentuan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Gaaya *et al.* (2017) dan Wirdaningsih *et al.* (2018) mengatakan bahwa kepemilikan keluarga yang tinggi akan mendorong pemegang saham lebih agresif terhadap pajak untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan Keluarga Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Struktur kepemilikan memiliki arti penting dalam sebuah perusahaan yang diyakini mampu mengoptimalkan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kepemilikan institusional (Winata, 2014). Kepemilikan institusional yang diproksikan dari persentase jumlah saham yang dimiliki institusi atau lembaga lain terhadap jumlah saham perusahaan yang beredar dapat berfungsi sebagai pengendali eksternal perusahaan guna mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keagenan (*agency problem*). Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Krisna (2019) yang mengatakan semakin kecil kepemilikan oleh institusi maka semakin mudah bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak, dengan kata lain kepemilikan institusional mampu mengurangi kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Keberadaan kepemilikan keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menyebabkan masalah keagenan yang baru, bukan lagi agen dengan pemegang saham, tetapi terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Masripah *et al.*, 2015). Perannya sebagai pemegang saham mayoritas mendukung untuk mengontrol keputusan yang akan diambil manajer sesuai dengan kepentingannya, salah satunya terkait penghindaran pajak (Maharani & Juliarto, 2019). Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, membutuhkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya dengan kualitas audit guna mengontrol tindakan pemegang saham mayoritas dalam membuat kebijakan, terutama tentang kebijakan penghindaran pajak. Kualitas audit yang tinggi akan mampu meningkatkan pengawasan kepada manajer dalam menyusun laporan keuangan, sehingga dapat mengurangi kesempatan pemegang saham mayoritas dalam memanfaatkan hak kendalinya untuk mendorong manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Gaaya *et al.*, 2017). Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Kualitas Audit Memperlemah Pengaruh Signifikan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

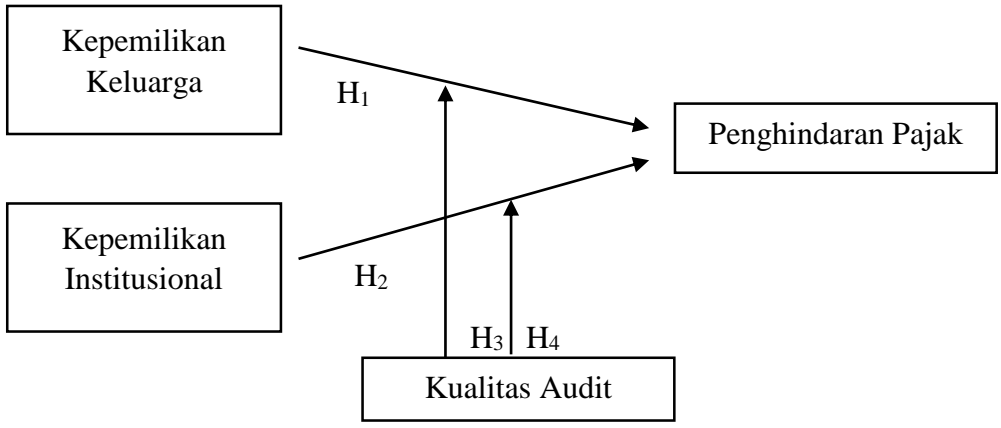
Peran kepemilikan institusional suatu perusahaan dapat mengurangi terjadinya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal dalam menjalankan penyusunan laporan keuangan akibat mekanisme pengawasan yang dilakukan guna mencegah perilaku oportunistik manajer (Jensen and Meckling, 1976). Proporsi kepemilikan saham perusahaan yang tinggi, memberi kendali yang cukup besar bagi investor institusi dalam melakukan pengontrol kinerja manajer untuk lebih berhati-hati atas setiap kebijakan yang ditetapkan, salah satunya terkait kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, peran kualitas audit dibutuhkan untuk mengevaluasi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Kualitas audit diyakini dapat mengontrol tindakan manajer dalam menjalankan tugasnya (DeAngelo & Masulis, 1980). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Krisna (2019) bahwa kualitas audit memperkuat pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak karena hasil audit laporan keuangan auditor KAP *The Big Four* memberi efek kepada manajer untuk lebih berhati-hati dalam melakukan mengambil keputusan, salah satunya terkait penghindaran pajak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Kualitas Audit Memperkuat Pengaruh Signifikan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel terikat (independen) adalah Penghindaran Pajak, dengan menggunakan dua variabel bebas (Independen), yaitu Kepemilikan Keluarga (X1) dan Kepemilikan Institusional (X2). Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu kualitas audit (Z). Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses *website* resminya di www.idx.co.id dan situs-situs resmi dari setiap perusahaan dengan periode selama 3 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini, sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Populasi pada penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kemudian diseleksi berdasarkan karakteristik tertentu karena populasi dirasa terlalu besar dan memakan waktu, tenaga, dan dana yang cukup besar (Sugiyono, 2019 hlm.127). Penentuan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti dengan harapan mendapatkan sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2017-2019.
- b. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun 2017 – 2019.
- c. Perusahaan manufaktur yang membukukan laba selama tahun 2017 – 2019 agar dapat menghitung jumlah kewajiban perpajakan perusahaan.
- d. Kepemilikan keluarga lebih dari 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif diterapkan untuk menggambarkan kondisi data dari objek penelitian secara mendalam. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel yang diteliti melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, minimal, dan maksimal. Berikut merupakan hasil pengolahan data statistik deskriptif dari setiap variabel pada Tabel 1:

Tabel 1. Data Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BTD (Y)	177	-0.03089	0.08458	0.004640	0.019974
FAM (X1)	177	6.9326	95.5303	58.27285	24.40401
INST (X2)	177	0	99.7112	67.89933	22.49719
QAUD (Z)	177	0	1	0.293785	0.456787
FAM*QAUD	177	0	95.5303	16.30613	29.47248
INST*QAUD	177	0	99.7112	21.29704	34.6894

Sumber: *Output STATA v.16.0* dan telah diolah

Setelah itu dilakukan uji pemilihan model regresi. Setelah menguji uji *chow*, uji *hausman*, maka dilakukan uji *lagrange multiplier* untuk menentukan model estimasi regresi antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat hasil pengujian *lagrange multiplier* bahwa nilai probabilitas pada model 1 dan model 2 adalah 0.0000 yang mana lebih kecil dari nilai α (0.05). Oleh karena itu, dari hasil uji *lagrange multiplier* dapat diputuskan model *Random Effect Model* (REM) yang digunakan pada kedua model persamaan.

Tabel 2. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Probability	α
Model 1	0.0000	0.05
Model 2	0.0000	0.05

Sumber: *Output STATA v.16.0* dan telah diolah

Setelah ditemuka model regresi pada penelitian, maka dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui pemenuhan syarat dari uji asumsi klasik dan memutuskan model regresi yang dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian (Ghozali, 2018 hlm.175). Model regresi yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM), dimana perhitungan yang dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS) sehingga tidak perlu lagi dilakukan uji autokorelasi dan heteroskedastisitas (Fajar, 2013). Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji multikolonieritas.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian telah berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dengan *skewness kurtosis* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

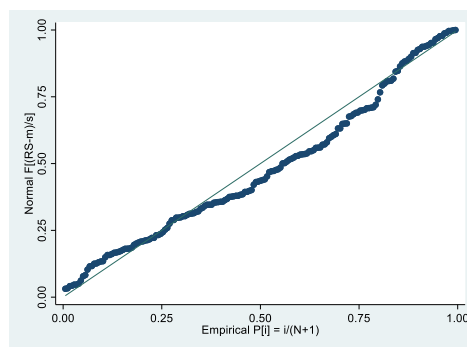
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas – *Skewness Kurtosis*

Variabel	Model 1		Model 2	
	<i>Skewness</i>	<i>Kurtosis</i>	<i>Skewness</i>	<i>Kurtosis</i>
BTD	1.11910	1.75589	1.11910	1.75589
FAM	-0.44341	-0.89418	-0.44341	-0.89418
INST	-1.30365	-1.88479	-1.30365	-1.88479
QAUD			0.91321	-1.17950
FAM*QAUD			1.52979	0.72954
INST*QAUD			1.12804	-0.54687

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat hasil pengujian normalitas melalui uji *skewness kurtosis*, yaitu pada model 1 maupun 2 besar nilai *skewness kurtosis* lebih besar dari -1.96 dan lebih kecil dari 1.96. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kualitas audit, dan penghindaran pajak tidak terjadi gangguan normalitas yang berarti data telah berdistribusi normal.

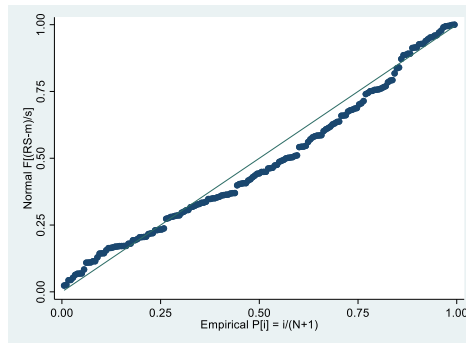
Selain analisis statistik, untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan analisis grafik, yaitu *Normal Probability Plot* dengan STATA v.16.0.



Sumber: *Output STATA v.16.0*

Gambar 2. *Normal Probability Plot Model 1*

Berdasarkan gambar di atas, pada hasil uji normalitas model 1 dapat dilihat dari grafik *Normal Probability Plot* bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya sesuai mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan analisis grafik dapat dikatakan data telah normal dan layak dijadikan model penelitian.



Sumber: *Output STATA v.16.0*

Gambar 3. *Normal Probablity Plot Model 2*

Berdasarkan gambar di atas, pada hasil uji normalitas model 2 dapat dilihat dari grafik *Normal Probability Plot* bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya sesuai mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, berdasarkan analisis grafik dapat dikatakan data telah normal dan layak dijadikan model penelitian.

Uji multikolonieritas adalah alat untuk mengetahui keberadaan korelasi antar variabel independen pada model regresi dimana sebaiknya antar variabel independen tidak terjadi hubungan. Keberadaan multikolonieritas dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* > 0,10 atau 10% dan VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel indepeden dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji VIF *Tolerance*

Variable	Model 1		Model 2			
	VIF	<i>Tolerance</i>	Sebelum <i>Centering</i>		Sesudah <i>Centering</i>	
			VIF	<i>Tolerance</i>	VIF	<i>Tolerance</i>
FAM	4.65	0.214835	7.09	0.141054	9.15	0.109324
INST	4.65	0.214835	7.50	0.133293	5.50	0.181983
QAUD			19.60	0.051010	16.16	0.061873
FAM*QAUD			7.04	0.142076	8.16	0.122542
INST*QAUD			17.95	0.055709	12.55	0.079658

Sumber: *Output STATA v.16.0* dan telah diolah

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hasil perhitungan pada model 1 menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, yaitu *tolerance* sebesar 0.214835 dan VIF sebesar 4.65 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Namun, hasil perhitungan model 2

menunjukkan bahwa terdapat multikolonieritas pada model penelitian. Oleh karena itu model persamaan 2 dilakukan *treatment* dengan *centering* variabel yang bermasalah, yaitu QAUD dan INST*QAUD. Nilai VIF sebelum dan sesudah *centering* untuk model 2 dapat dilihat pada Tabel 10.

Setelah dilakukan *treatment* dengan cara *centering*, nilai VIF untuk variabel QAUD dan INST*QAUD masih lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance* lebih kecil dari 10%. Menurut Winarno (2011), cara untuk mengatasi adanya multikolonieritas dengan menghilangkan salah satu variabel independen, seperti variabel yang memiliki hubungan linier yang kuat dengan variabel lain. Namun, apabila menurut teori pengurangan variabel independen tidak dimungkinkan, berarti tidak masalah jika model mengandung multikolonieritas karena estimatornya masih bersifat BLUE. Sifat BLUE tidak berpengaruh terhadap ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Oleh karena itu, untuk model persamaan 2 pada penelitian ini dibiarkan adanya multikolonieritas.

Pengujian koefisien determinasi digunakan guna mengukur seberapa besar persentase kemampuan variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil pengujian R^2 yang diolah dengan menggunakan program STATA v.16.0, sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

	<i>R Square</i>
Model 1	0.1048
Model 2	0.1323

Sumber: *Output* STATA v.16.0 dan telah diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat ditarik kesimpulan dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.1048 pada model 1. Angka ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0.1048 atau 10.48% dan sisanya 89.52% dapat dijelaskan oleh faktor lain. Sedangkan, pada model 2 diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) 0.1323. Angka ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, kualitas audit, kepemilikan keluarga yang dimoderasi kualitas audit, dan kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh kualitas audit terhadap

penghindaran pajak sebesar 0.1323 atau 13.23% dan sisanya 86.77% dapat dijelaskan oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis dengan uji parsial (uji T) dilakukan guna mengetahui pengaruh satu variabel independen secara parsial atau individual dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018 hlm.98-99). Adapun kriteria pengambilan keputusan, jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi kurang dari 0,05 berarti variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga H_1 diterima dan sebaliknya jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan signifikansi lebih dari 0,05 berarti H_1 ditolak.

Untuk mengetahui nilai t_{tabel} dalam penelitian ini dengan melihat tabel statistik pada signifikansi 0,05 atau 5%. Selain itu, dalam menentukan derajat kebebasan (df) dilakukan dengan rumus $n-k-1$. Pada model 1 diketahui df sebesar $177-3-1 = 173$, sedangkan pada model 2 df sebesar $177-4-1 = 172$. Berdasarkan tabel statistik, diperoleh t_{tabel} untuk model 1 sebesar 1.65371 dan model 2 sebesar 1.65376. Hasil pengujian regresi parsial (Uji T) yang diolah dengan menggunakan program STATA v.16.0 pada tabel 12, dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model 1				Model 2			
	Coef.	T	P> z		Coef.	T	P> z
(Constant)	0.0096624	1.21	0.226	(Constant)	0.0097027	1.06	0.288
FAM	0.0001621	1.98	0.047**	FAM	0.0000903	0.86	0.390
INST	-0.0002131	-2.28	0.023**	INST	-0.0001362	-1.27	0.206
				QAUD	0.0084331	0.45	0.654
				FAM*QAUD	0.0001547	0.93	0.353
				INST*QAUD	-0.0002853	-1.25	0.211

Keterangan: * signifikansi 1%; ** signifikansi 5%; *** signifikansi 10%.

Sumber: Output STATA v.16.0 dan telah diolah

Kepemilikan Keluarga dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 1, diperoleh hasil uji T yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki $t_{hitung} 2.65 > 1.6535$ dengan signifikansi $0.047 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis pertama pada penelitian ini terbukti dan diterima yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena tingginya kepemilikan keluarga selaku pemegang saham mayoritas mampu memberi dorongan terhadap kinerja manajer dalam memutuskan

kebijakan dan operasi perusahaan (Masripah, Diyanty and Fitriasar, 2015). Didukung oleh teori keagenan yang dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa tingginya persentase kepemilikan keluarga akan mendorong pemanfaatan haknya dalam proses penentuan kebijakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang diproyeksikan dari besarnya laba perusahaan, dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gaaya *et al.* (2017) mengatakan bahwa kepemilikan keluarga yang tinggi akan mendorong pemegang saham lebih agresif terhadap pajak untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Perusahaan dapat menghemat beban pajak sehingga kas yang tersedia dapat digunakan untuk aktivitas yang lebih menguntungkan. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan ini disebabkan karena penelitian Wijayani (2016) yang memiliki rata-rata kepemilikan keluarga yang relatif besar, yaitu 52,68% dengan proksi yang digunakan adalah teknik *dummy*, tetapi kepemilikan tersebut bukan kepemilikan terkonsentrasi yang berperan sebagai pengendali perusahaan, sehingga pengaruhnya terhadap penghindaran pajak tidak signifikan.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 1, hasil uji T yang menyatakan bahwa nilai $t_{hitung} 2.23 > 1.6535$ dengan signifikansi $0.023 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis kedua pada penelitian ini terbukti dan diterima yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa investor institusi akan bertindak selaku pihak yang mengawasi kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh manajer, salah satunya tindakan penghindaran pajak. Artinya semakin besar kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan mengurangi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krisna (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusi yang besar maka akan semakin sulit bagi manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septiadi *et al.*, (2017).

Perbedaan hasil ini disebabkan pada penelitian Septiadi *et al.*, (2017) dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan dan pertanian pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 yang menunjukkan dengan rata-rata kepemilikan institusional yang cukup tinggi, yaitu 60,83% tidak mampu menekan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajer. Penghindaran pajak oleh perusahaan dilakukan untuk mendapatkan sumber dana yang berlebih, sehingga dapat digunakan untuk tindakan lain, seperti investasi ataupun untuk kesejahteraan kepemilikan institusional itu sendiri.

Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 2, diperoleh hasil uji T yang menyatakan bahwa nilai t_{hitung} $0.93 < 1.65376$ dengan signifikansi $0.353 > 0.05$. Dengan demikian, hipotesis ketiga pada penelitian ini tidak terbukti dan ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa KAP selaku auditor eksternal, baik KAP *The Big Four* maupun KAP *Non The Big Four*, dalam melakukan proses pengauditan lebih fokus pada pedoman standar mutu yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kurang berperan dalam memperlemah hubungan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maharani dan Juliarto (2019), yang menyatakan bahwa dengan adanya kualitas audit tidak memiliki peran pada tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut karena penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan melainkan memanfaatkan celah-celah, sehingga sulit untuk mendeteksi adanya penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gaaya *et al.* (2017) mengatakan bahwa kualitas audit mampu memperlemah hubungan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini disebabkan pada penelitian Gaaya *et al.* (2017) dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di *Tunis Stock Exchange* (BVMT) pada periode tahun 2008-2013. Selain itu, kondisi ekonomi yang sedang mengalami masa transisi mendorong pemerintah Tunis untuk mengatasi masalah penghindaran pajak secara tegas guna menarik investor asing.

Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6 pada model persamaan 2, diperoleh hasil uji T yang menyatakan bahwa nilai t_{hitung} $1.25 < 1.65376$ dengan signifikansi $0.211 > 0.05$. Dengan demikian, hipotesis keempat pada penelitian ini tidak terbukti dan ditolak. Hal ini dapat disebabkan KAP selaku auditor eksternal, baik KAP *The Big Four* maupun KAP *Non The Big Four*, hanya memberikan opini audit atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Septiadi *et al.*, 2017). Apabila pengungkapan laporan keuangan sudah wajar, maka perusahaan akan mendapatkan opini atas kewajaran dari penyajian laporan keuangan perusahaan sehingga tidak adanya peran kualitas audit dalam memperkuat hubungan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Selain itu, berdasarkan data yang diolah oleh peneliti menunjukkan bahwa dari 177 data yang diteliti pada perusahaan manufaktur tahun 2017-2019, terdapat 51 sampel atau 28.81% yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four*. Sedangkan, sebanyak 126 sampel atau 71.19% yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *Non The Big Four*. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel penelitian menggunakan KAP *Non The Big Four* untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang diyakini memiliki tingkat kualitas laporan keuangan yang rendah sehingga tidak mampu mencerminkan peran kualitas audit dalam memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian (Krisna, 2019) yang dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, dimana menyatakan bahwa dengan tingginya kepemilikan institusional didukung oleh kualitas audit yang baik mampu mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan manajemen untuk berniat melakukan tindakan kecurangan, seperti penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data melalui pembuktian hipotesis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif signifikan

terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga yang mengalami kenaikan, maka penghindaran pajak juga akan meningkat. (2) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang mengalami kenaikan, maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. (3) Kualitas Audit tidak memiliki peran dalam memperlemah hubungan Kepemilikan Keluarga dengan Penghindaran Pajak. Hal tersebut menunjukkan KAP *The Big Four* yang mengaudit perusahaan tidak mampu berperan dalam memperlemah hubungan kepemilikan keluarga terhadap tindakan penghindaran pajak. (4) Kualitas Audit tidak memiliki peran dalam memperkuat Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak. Hal tersebut menunjukkan KAP *The Big Four* yang mengaudit perusahaan tidak mampu berperan dalam memperkuat hubungan kepemilikan institusional terhadap tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menambah variabel independen lain seperti, *transfer pricing*, komite audit, peraturan perpajakan dan kepemilikan manajemen. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperpanjang periode penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. (2) Bagi perusahaan manufaktur, disarankan lebih meningkatkan kinerja manajemen perusahaan serta investor institusi dalam mengawasi kegiatan perusahaan agar tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir sehingga reputasi perusahaan dapat terjaga. (3) Bagi investor, disarankan mengkaji terlebih dahulu kinerja suatu perusahaan, salah satunya terkait kebijakan perpajakan, karena perusahaan yang memiliki pembayaran pajak yang efektif memiliki reputasi perusahaan yang baik sehingga berdampak pada keberlanjutan perusahaan di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmawan, I. G. H. and Sukartha, I. M. (2014) 'Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), pp. 143–161.
- DeAngelo, H. and Masulis, R. W. (1980) 'Optimal Capital Structure Under Corporate and

- Personal Taxaton', *Journal of Financial Economics*, 8(1), pp. 3–29.
- Edison, A. (2017) 'Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr)', *Bisma*, 11(2), pp. 164–175.
- Gaaya, S., Lakhal, N. and Lakhal, F. (2017) 'Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality', *Managerial Auditing Journal*, 32(7), pp. 731–744.
- Ghozali, I. (2018) 'Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25', in. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. (1976) 'Theory of The Firms: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure', *Journal of Financial Economics*, 3(4), pp. 305–360.
- Khan, M., Srinivasan, S. and Tan, L. (2017) 'Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence', *Accounting Review*, 92(2), pp. 101–122.
- Krisna, A. M. (2019) 'Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi', *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 18(2), pp. 82–91.
- Lisa, O. (2012) 'Asimetri Informasi Simetri Informasi dan Manajemen Laba', *Jurnal WIGA*, 2(1), pp. 42–49.
- Maharani, W. and Juliarto, A. (2019) 'Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(4), pp. 1–10.
- Masripah, M., Diyanty, V. and Fitriasar, D. (2015) 'Controlling Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance', *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), pp. 167–180.
- Praptidewi, L. and Sukartha, I. (2016) 'Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan', *E-Jurnal Akuntansi*, 17(1), pp. 426–452.
- Putri, R. K. (2015) 'Pengaruh Manajemen Keluarga Terhadap Penghindran Pajak', *Jurnal Akuntansi*, 7(1), pp. 60–72.
- Septiadi, I., Robiansyah, A. and Suranta, E. (2017) 'Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance', *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), pp. 114–133.
- Sugiarto, M. (2011) 'Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Intervening', *Jurnal Akuntansi Kontemporer*.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2nd edn. Yogyakarta: PT Alfabeta.

- Tandean, V. A. and Winnie (2016) 'The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance', *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), pp. 28–38.
- Villalonga, B. and Amit, R. (2006) 'How do family ownership, control and management affect firm value?', *Journal of Financial Economics*, 80(2), pp. 385–417.
- Wijayani, D. R. (2016) 'Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(2), pp. 181–192.
- Winarno, W. W. (2011) *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi Ketiga*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Winata, F. (2014) 'Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013', *Tax & Accounting Review*, 4(1), pp. 1–11.
- Wirdaningsih, Sari, R. N. and Rahmawati, V. (2018) 'Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak dengan Efektivitas Komisaris Independen dan Kualitas Audit sebagai Pemoderasi', *Jurnal Akuntansi*, 7(1), pp. 15–29.